

Lemhannas Buka P3N Angkatan XXVII, Bekali Pemimpin Nasional Hadapi Tantangan Bangsa

Updates. - WARTAWAN.ORG

Feb 10, 2026 - 10:14



JAKARTA - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Ace Hasan Syadzily, secara resmi menandai dimulainya Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Angkatan XXVII. Acara pembukaan berlangsung khidmat di kantor Lemhannas RI, Jakarta Pusat, pada Senin, 9 Februari 2026.

P3N Angkatan XXVII ini diikuti oleh 85 peserta terpilih yang mewakili beragam

unsur strategis bangsa, meliputi prajurit TNI, anggota Polri, aparat sipil negara (ASN) dari berbagai kementerian dan lembaga, serta para pimpinan organisasi kemasyarakatan.

Ace Hasan Syadzily menjelaskan bahwa setiap peserta P3N telah melalui proses seleksi yang sangat ketat. "Peserta dari TNI dan Polri minimal berpangkat perwira tinggi bintang satu, sementara peserta ASN berasal dari kementerian dan lembaga dengan jabatan eselon II," ungkapnya.

Selama tiga setengah bulan ke depan, para peserta akan mendalami berbagai materi krusial. "Materi utama meliputi empat konsensus kebangsaan, ketahanan nasional, geopolitik, serta berbagai bidang studi yang tergabung dalam konsep astagatra," ujar Ace Hasan.

Ia menekankan bahwa P3N dirancang sebagai wadah strategis untuk menyatukan visi lintas sektor. "Ini sekaligus menjadi sarana penting dalam menyiapkan para elite nasional kita agar siap menghadapi tantangan multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia," paparnya.

Menyikapi dinamika geopolitik global yang kian kompleks dan kekhawatiran akan potensi konflik berskala besar, Ace Hasan Syadzily menegaskan urgensi kewaspadaan nasional. "Indonesia harus terus memperkuat ketahanan energi, pangan, dan ekonomi agar mampu bertahan dalam situasi global yang tidak menentu," tegasnya.

Beliau melanjutkan, "Lemhannas mengajarkan pentingnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan nasional, dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagai prasyarat utama ketahanan nasional."

Dalam upaya penguatan integritas kepemimpinan, Lemhannas kembali menjalin sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tahun kedua. Kolaborasi ini menghasilkan kurikulum yang disusun bersama, bahkan menghadirkan pengajar langsung dari KPK.

"Materi diberikan selama dua hari, mulai dari pencegahan hingga penguatan regulasi agar pemimpin nasional memiliki integritas tinggi dan terhindar dari praktik korupsi," jelas Ace Hasan.

Ia menambahkan, "Penguatan integritas ini menjadi kunci agar kekayaan alam Indonesia dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan bangsa, tanpa ada pelanggaran hukum yang terjadi." (PERS)